

**POLICY PERFOEMANCE DALAM VAKSINASI MASSAL COVID-19
DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2021**

Oleh : Siti Rahayu

Pembimbing : Zulfa Harirah M.S

¹Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Sitirahayuu.9463@gmail.com

zulfaharirahms@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Riau
Pekanbaru, Riau

Abstract

The Covid-19 vaccination program is one of the policies issued by the Pekanbaru City government in dealing with Covid-19. It is hoped that this program can cover the people of Pekanbaru City and be accepted by the community. However, the Covid-19 vaccination has not been evenly distributed due to public distrust of the Covid-19 vaccination, in this case it can be judged that the community does not know and understand the importance of vaccination in dealing with the Covid-19 outbreak. Furthermore, the data collection techniques used are interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and supported by secondary data, namely documents related to interviews, observations, and document studies. The location of this research is in the city of Pekanbaru. The results of the research carried out are that the Policy Performance in the Covid-19 mass vaccination in Pekanbaru City in 2021 has been carried out in accordance with the 2021 Pekanbaru City Regulation in paragraph 17A, starting from setting and collecting data on the target recipients of Covid-19 vaccinations. The Policy Effect, namely the target coverage and comparisons have not been achieved, the deviation bias exists, access to affordable locations, communication is not good and access is equal, and the suitability of the program to the needs of the community is appropriate. In Policy Impact, the dimensions of the initial results of policy outputs are appropriate, the medium term is appropriate and the long term is appropriate.

Keywords: Policy Performance, Policy Effect, Policy Impact

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang melakukan berbagai kebijakan dalam mengatasi pandemi *Covid-19*. Indonesia sangat antisipasi dan dinamis dalam menerbitkan berbagai kebijakan dalam pengendalian dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi *Covid-19* merupakan sebuah keadaan dimana penyakit yang disebabkan oleh virus corona menjadi mewabah di lingkungan kehidupan masyarakat.

Semua lapisan masyarakat merasakan langsung efek yang ditimbulkan oleh wabah tersebut, hampir seluruh sektor pemerintahan mendapat imbas buruk dengan datangnya wabah ini, masyarakat mengalami kesusahan, angka kematian tinggi, kegelisahan menyeruak, dan tangisan terdengar dari seluruh penjuru negeri. Dalam hal ini Pemerintahan Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas praturan walikota pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

Program vaksinasi massal merupakan salah satu tindakan intervensi yang efektif dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan vaksinasi massal ini bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Adapun tahapan dalam pelaksanaan vaksinasi massal *Covid-19*.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Vaksinasi Massal *Covid-19*

No	Tahap Vaksinasi	Waktu Pelaksanaan	Sasaran
1.	Pertama	Januari-April	Kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang

			serta Mahasiswa
2.	Kedua	Januari-April	Petugas pelayanan publik dan kelompok usia lanjut (≤ 60 tahun)
3.	Ketiga	April	Masyarakat rentan geospasial, sosial dan Ekonomi, dan pelaku perekonomian Lainnya
4.	Keempat	April	Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya

Sumber: Dinkes Kota Pekanbaru, 2021

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019* Pasal 17A ayat (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* berdasarkan pedataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi *Covid-19*. Berdasarkan kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru diatas diharapkan mampu dijalankan oleh masyarakat Kota Pekanbaru apalagi sebagai masyarakat yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin pada program vaksinasi massal yang diadakan oleh pemerintah dan tentunya menjadi wajib sesuai dengan praturan yang dibuat. Namun hal ini sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru tidak menghiraukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tersebut dengan alasan kekhawatiran atas efek samping dari suntikan vaksin dan tidak percaya vaksin *Covid-19* sehingga dapat dinilai bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mengenal dan memahami pentingnya vaksinasi dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19*.

Tabel 2 Jumlah Masyarakat Yang Sudah Vaksin Di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Sasaran	Dosis Vaksinasi			Total Suda h Vaksi n
	1	2	3	
SDM Kesehatan	16.100	15.449	9.172	11.053
Lansia	32.376	26.153	47	52.759
Petugas Publik	132.572	117.228	50	60.005
Masyara kat rentan & umum	429.045	315.188	942	529.103
Remaja	91.611	72.813	2	95.176

Sumber: Dinkes Kota Pekanbaru, 2021

Tabel diatas terlihat bahwa jumlah masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah disuntik vaksin masih berada di titik 70% artinya suntikan vaksin yang diberikan belum mencapai 100%, masyarakat Kota Pekanbaru belum semuanya menerima suntikan vaksin ditahun 2021. Penjelasan dari tabel diatas yaitu pemberian suntikan vaksin terdapat 3 dosis yang telah diberikan kepada masyarakat dan masyarakat yang sudah menerima vaksinasi tersebut sebanyak 748.096 orang dari 5 kelompok sasaran yang ada di Kota Pekanbaru yang dilakukan secara bertahap. Pertama kelompok sasaran SDM Kesehatan yakni yang sudah disuntik sebanyak 11.035 orang, kelompok sasaran lansia yang sudah disuntik vaksin berjumlah 52.759 orang, kelompok pada sasaran petugas publik terdapat 60.005 orang yang telah disuntik vaksin, kelompok sasaran masyarakat rentan dan umum yang sudah divaksin sebanyak 529.103 orang dan yang terakhir kelompok sasaran yang telah disuntik vaksin sebanyak 95.176 orang. Dalam beberapa

kesempatan, program vaksinasi massal *Covid-19* pada tahun 2021 peminat untuk suntikan vaksin sangatlah tinggi yang diadakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel 1.2 masih berada di jumlah ribuan masyarakat melanjutkan suntikan dosis ke-2 suntikan vaksin, sehingga mencapai 70% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa program vaksinasi massal *Covid-19* dibeberapa kesempatan masyarakat memiliki minat untuk disuntik namun dibeberapa kesempatan yang lainnya sebagian besar masyarakat masih tidak memahami dan mengenal pentingnya vaksinasi dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan program vaksinasi tersebut belum merata secara keseluruhan 100% penduduk Kota Pekanbaru dan dapat dikatakan belum mencapai (*herd immunity*) sebagai tujuan utama dari vaksinasi *Covid-19* yang diberikan oleh pemerintah sebagai kebijakan dalam penanggulangan bencana alam dan target untuk vaksinasi massal *Covid-19* belum sepenuhnya tercapai atau merata Sehingga dalam fenomena tersebut peneliti menarik untuk meneliti tentang **“Policy Performance Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Pekanbaru Di Tahun 2021”**

Kerangka Teori

Policy Performance

Indikator untuk mengukur *policy performance* dapat dilihat dari *policy effect* (efek kebijakan) yaitu konsekuensi langsung dari *policy output* dan 2) *policy impact* (dampak kebijakan) yaitu dampak yang muncul setelah adanya *policy outcomes*. Selanjutnya indikator yang digunakan dalam penelitian yang mendasari dalam tulisan ini adalah indikator *policy output* dan indikator *policy outcome*.

Dimensi utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: dimensi *policy output* dan dimensi *policy outcome*.

Dimensi *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan.

Policy Output

Menurut Ripley (1985) dalam Purwanto (2012: 106-110), terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output*, yaitu: cakupan, bias, akses, frekuensi, *servis delivery* (ketetapan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Penulis memilih beberapa indikator yang relevan dengan kajian ini demi mencapai ketepatan pengukuran kinerja *policy output*. Indikator *policy output* yang dinilai relevan adalah :

1) Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan

2) Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin

menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

4) Kesesuaian program dengan kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak

Policy Outcome

Indikator *policy outcomes* yang digunakan untuk mengukur hasil implementasi suatu kebijakan. Menurut Purwanto (2012: 110), hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lain-lain) menuju kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, lebih sehat, dan lain-lain). Indikator *policy outcomes* yang digunakan dalam penulisan ini adalah (1) *initial outcome* atau hasil awal dari keluaran kebijakan, (2) *intermediate outcome* atau jangka menengah dan (3) *long-term outcome* atau hasil jangka panjang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi, saat melakukan sesuatu penelitian kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Ada 4 komponen proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu:

- Pengumpulan data
- Reduksi data
- Penyajian data
- Penarikan kesimpulan

Hasil Dan Pembahasan

Dosis	Target Sasaran					Jumlah Sasaran penduduk	Total keseluruhan Yang Sudah divaksin
	SDM Kesehatan	Lansia	Petugas Publik	Masyarakat Retan & Umum	Remaja		
1	16.100	32.376	13.2572	429.045	91.611	1.074.989	748.096
2	15.449	26.153	11.728	315.188	72.813		
3	9.172	47	50	942	2		

Policy Performance Dalam Vaksinasi Massal Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021

Vaksinasi massal Covid-19 merupakan salah satu kebijakan dari sekian banyak program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi Wabah Covid-19. Tingkat keberhasilan dari kebijakan pengadaan program vaksinasi massal dapat diraih apabila masyarakat secara keseluruhan mendapatkan vaksin serta memahami dan mengenali pentingnya vaksinasi dalam menghadapi situasi

pandemi Covid-19. Akan tetapi, agar vaksinasi di Kota Pekanbaru ini bisa berjalan dengan efektif, dibutuhkan kepercayaan dan kewajiban untuk memahami serta melaksanakan kebijakan dari pemerintah mengenai vaksinasi massal Covid-19.

Policy Performance Dalam Vaksinasi Massal Covid-19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2021 dapat dilihat dari indikator *Policy Performance* menurut Ripley dan Purwanto terdiri dari :

Policy Effect (Efek Kebijakan) Yaitu Konsekuensi Langsung Dari Policy Output

1. Cakupan

- Menetapkan siapa yang menjadi kelompok sasaran

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17A ayat (1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda tersebut di peruntukkan untuk masyarakat Kota Pekanbaru dari SDM Kesehatan berlanjut ke Lansia, Petugas Publik, Masyarakat Retan & Umum dan terakhir remaja.

Tabel 3 Sasaran Program Vaksinasi Kota Pekanbaru Per-31 Desember 2021

Sumber: Dinkes Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran vaksinasi massal di tahun 2021 terdapat 5 kelompok sasaran dan terdapat 3 dosis suntikan yang diberikan ke kelompok sasaran, namun sasaran yang diutamakan kelompok sasaran dari vaksinasi tersebut bertahap yakni yang pertama SDM Kesehatan berlanjut ke Lansia, Petugas Publik, Masyarakat Retan & Umum dan terakhir remaja. Dari kelima kelompok sasaran vaksinasi yang merupakan masyarakat Kota Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 1.074.989 orang, dari

jumlah tersebut yang sudah di vaksin berada di angka 748.096 orang.

- b. Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah dapat layanan terhadap total kelompok target.

Rasio perbandingan cakupan jumlah dari tingkat kota hingga provinsi sebagaimana berikut ini :

❖ Tingkat Kota Pekanbaru

$$\frac{\text{Jumlah sasaran target}}{\text{Jumlah penduduk kota Pekanbaru}} \times 100\%$$

$$\frac{748.096}{1.074.989} \times 100\% = 70\%$$

❖ Tingkat Provinsi Riau

$$\frac{\text{Jumlah sasaran target}}{\text{Jumlah penduduk provinsi Riau}} \times 100\%$$

$$\frac{3.350.000}{6.450.000} \times 100\% = 52\%$$

Tabel 4 Rasio Cakupan

No	Tingkat Cakupan	Rasio
1	Kota Pekanbaru	70%
2	Provinsi Riau	52%



Sumber: Dinkes Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas dapat peneliti menilai bahwa cakupan program vaksinasi massal Kota Pekanbaru hingga provinsi dapat dikatakan sudah mencapai minimal target yang diberikan oleh kementrian sesuai dengan hasil wawancara Ibu Delfi diatas, jadi Kota Pekanbaru sudah melaksanakan vaksin mencapai 70% dari penduduk Kota Pekanbaru namun belum merata karena belum secara keseluruhan penduduk Kota Pekanbaru telah di suntik vaksin.

2. Bias

Dalam pelayanan vaksinasi massal ini terdapat pelaksanaan vaksinasi yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada pemerintah yang artinya vaksinasi ini didapatkan secara gratis.

Gambar 1.1 Pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021

Sumber: Dinkes Kota Pekanbaru, 2021

Pada gambar pemberitaan diatas terlihat masyarakat protes dan kecewa serta mempersulit masyarakat yang mau divaksin secara sukarela pasalnya, para pelaksana vaksinasi massal tersebut membuat aturan yang dinilai sangat mengada-ada seperti syarat yang harus di miliki selain KTP masyarakat juga harus memiliki undangan vaskin dan Surat Keterangan dari RT/RW. Dalam fenomena ini peneliti menilai terkesan pilih kasih dalam pemberian vaksinasi massal tersebut. Dari pemberitaan diatas membuat peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang mendapatkan vaksin di lokasi tersebut.

Dapat dinilai adanya terjadi pembiasan atau penyimpangan kelompok sasaran target pada program vaksinasi massal Covid-19 Kota Pekanbaru 2021 terlihat sebagai pemberi vaksin membuat syarat yang mengada-ada sehingga terkesan pilih kasih padahal dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tidak melihat kesetaraan gender dan tidak memandang kemapanan ekonomi masyarakat, karena program vaksinasi ini menjadi hak asasi masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi ini.

3. Akses (Jangkauan) Program

- a. Lokasi yang mudah dijangkau oleh kelompok sasaran

Gerai vaksinasi massal di Kota Pekanbaru berada di beberapa titik yakni

di titik pusat kota dan sudut kota serta ditempat peramaian seperti salah satunya Mall SKA Kota Pekanbaru, Rumah Sakit Bhayangkara, Kantor Wali Kota Pekanbaru dan di tempat yang lainnya. Untuk menuju kesana peneliti telah melihat dan merasakan sendiri, adanya transportasi umum yang bisa digunakan untuk menuju gerai vaksinasi massal seperti di Mall SKA dan jalan yang ditempuh cukup bagus hanya saja sedikit macet. Dan di beberapa titik gerai vaksinasi yang lainnya juga sama adanya transportasi umum untuk sampai ke titik tersebut.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan kemampuan menjelaskan dan menginformasikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Dari hasil penelitian menunjukkan komunikasi program vaksinasi massal *Covid-19* Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Terlihat dari berlangsungnya pelaksanaan vaksinasi massal *Covid-19* masyarakat tidak menjaga jarak ataupun mengikuti praturan prokes kesehatan pada masa *Covid-19* sehingga terkesan berdesakan, ricuh dan mengantri dalam pemberian vaksin tersebut.

c. Kesamaan akses terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari berbagai karakteristik

Dari beberapa indikator di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dari segi akses program vaksinasi massal *Covid-19* Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, walaupun pemerintah kota telah menetapkan atau memerintah untuk menjaga prokes kesehatan dalam berlangsungnya vaksinasi massal *Covid-19* sehingga tidak terjadi kekerumunan namun masyarakat kurang sadar dalam hal tersebut sehingga dapat dikhawatirkan penularan *Covid-19* sehingga berbanding terbalik dengan pemberian vaksinasi ini sebagai pemutusan mata rantai *Covid-19* serta komunikasi antar Satgas dan masyarakat kurang baik sehingga membuat

masyarakat sebagai penerima vaksinasi ini kecewa.

4. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Masyarakat terutama yang menjadi garda terdepan atau yang membutuhkan vaksin ini merasa terbantu dengan keberadaan program vaksinasi massal *Covid-19* yang diberikan secara gratis serta pelayanan yang memuaskan bahkan ditangani langsung oleh tenaga medis yang profesional.

Policy Impact (dampak kebijakan) yaitu dampak yang muncul setelah adanya policy outcomes.

1. Hasil awal keluaran kebijakan

Berikut dapat dinilai dari 3 bentuk hasil dari awal keluaran vaksinasi:

a. *awareness* (kesadaran) : kesadaran yang diterima dari kelompok sasaran vaksinasi setelah mendapatkan intervensi kebijakan dari pelaksanaan Program Vaksinasi adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya penanganan penularan *Covid-19* melalui vaksinasi, dalam hal ini meningkatkan imun didalam tubuh sehingga dapat mencegah kematian di situasi wabah *Covid-19*.

b. *Knowledge* (Pengetahuan) : pengetahuan yang didapatkan oleh tenaga kesehatan juga meningkat mengenai vaksinasi *Covid-19*, hal ini dikarenakan ada aktivitas *sharing experience* antar petugas tenaga kesehatan.

c. *Skill (keterampilan)* : keterampilan merupakan hal utama yang akan didapatkan oleh tenaga kesehatan dengan adanya kegiatan peningkatan pelayanan Program Vaksinasi tersebut sehingga keterampilan menjadi meningkat, hal ini dikarenakan ada aktivitas *drill emergency* yang bertujuan meningkatkan *skill* sehingga petugas medis menjadi terampil 24 jam.

2. Jangka menengah

Berikut dapat dinilai dari 2 bentuk hasil dari jangka menengah setelah hasil awal keluaran vaksinasi:

1. *Behavior* (perilaku). Adanya perubahan perilaku tenaga kesehatan yang mau menjadi mentor bagi fasilitas kesehatan lainnya. Perilaku masyarakat Kota Pekanbaru juga berubah menjadi lebih cepat tanggap dalam melaporkan kematian dan sembuh dari dampak *Covid-19*.

2. *Decision Making* (pengambilan kebijakan). kebijakan program vaksinasi menghasilkan pengambilan kebijakan atau keputusan mengenai tindak lanjut program vaksinasi massal dosis kedua dan dosis ketiga. Tabel berikut dapat dilihat untuk vaksin ke-2 dan ke-3 antusiasme masyarakat meningkat.

3. Jangka Panjang

Dampak jangka panjang adalah kondisi yang diharapkan (*conditions*). Jangka panjang yang ingin dicapai dari program Vaksinasi adalah penurunan angka kematian. Dengan tujuan pengadaan vaksinasi itu sendiri, yakni terwujudnya kekebalan kelompok (*herd immunity*) hingga wabah *Covid-19* lenyap dan terhenti sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun yang akan mendatang.

Agar menjaga konsistensi peneliti dan terwujudnya tujuan dari peneliti ini, setelah menilai tujuh dimensi pelayanan program vaksinasi yang ada di Kota Pekanbaru, selanjutnya peneliti menghubungkan ketujuh dimensi dalam dua indikator yang digunakan penulis tersebut dengan tujuan program vaksin. Dengan begitu peneliti dapat menilai apa-apa saja tujuan dari program ini yang sudah tercapai dan belum tercapai. Semakin banyak tujuan yang tercapai dari program ini maka semakin tinggi tingkat keberhasilan atau kinerja program vaksinasi di Kota Pekanbaru.

Tabel 5 Penilaian Indikator Kinerja Program Vaksinasi Covid-19 Pada Policy Effect

N O	Dimensi	Indikator	Keterangan
1	Cakupan	Sasaran	Ada
		Perbandingan	Belum Tercapai
2	Bias	Penyimpangan	Ada
3	Akses	Lokasi	Terjangkau
		Komunikasi	Belum Baik
		Akses Sama	Sama
4	Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan Masyarakat	Kesesuaian	Sesuai

Sumber : Olahan Penulis

Kesimpulan

Policy Perormance Dalam Vaksinasi Massal *Covid-19* Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 pada pasal 7A yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dari pendataan dan menetapkan sasaran penerimaan vaksinasi *Covid-19* yang telah menjadi wajib bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Penilaian indikator kinerja program vaksinasi *Covid-19* pada *Policy Effect* yaitu cakupan sasaran ada dan perbandingan belum tercapai, bias penyimpangan itu ada, akses untuk lokasi terjangkau, komunikasi belum baik dan akses sama, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sesuai. Pada *policy impact*, dimensi hasil awal keluaran kebijakan sesuai, jangka menengah sesuai

dan jangka panjang sesuai. Program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kota Pekanbaru dapat membantu dan meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan meningkatkan pemerataan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan vaksin di Kota Pekanbaru dalam penanggulangan Covid-19.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV Alfabeta
- Amad Sukarda. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta:Sinar Grafika
- Gem, Collins. 1999. *Kamus Saku Biologi*. (Jakarta: Erlangga)
- Hardani, Dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Penerbit Pustaka Ilmu
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo:Zifatama Publisher.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st Ed.). Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung:Penerbitan Alfabeta
- Myazinda. *Kelompok Sosial Dan Keidupan Masyarakat*. Bandung:Cv Yasindo Multi Aspek
- Nugrahani, F. (2014). *Konsep Dasar Penelitian*. Cakra Books.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Pt Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2014.*Publik Policy*. Jakarta:Pt Elex Media Komputindo
- Sudarmanto, E. 2020. *Manajemen Sektor Publik*. Medan:Penerbit Kita Menulis
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*. Yogyakarta:Media Presindo.

Jurnal

- Beniac, D. R., Andonov, A., Grudeski, E., & Booth, T. F. (2006). Architecture Of The SARS Coronavirus Prefusion Spike. *Nature Structural And Molecular Biology*, 13(8), 751–752. <https://doi.org/10.1038/Nsmb1123>
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasicovid-19 Di Indonesia Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Rechts Vinding*, 10(April), 1263.
- Ms, Z. H., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 36–53.
- Mulyani, S., Eskol, F., & Sirait, T. (2021). Pemberitaan Vaksin Nusantara Terhadap Kepercayaan Generasi Millenial Pada Kinerja Kabinet Jokowi Jilid II Nusantara Vaccine News On Millennial Generation ' S Trust In The Performance Of Jokowi ' S Cabinet Volume II. 79–90. <https://doi.org/10.30818/Jpkm.2021.2060308>
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543–554. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i6.15324>
- Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law).

Khazanah Hukum, 3(2), 80–86.
<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>

Ratna, E., & Moedy, S. (2022). (*Testing, Trecing, Treatment*). 04(02).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Praturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019